



Pemberdayaan Taruna Pelayaran melalui *Workshop* Anti Korupsi Maritim

(Strategi Membangun Pelaut Berintegritas untuk Menghadapi Tantangan Global)

Dian erliyani ^{1*}, Slamet Riyadi ²

¹Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Indonesia

²PPSDMPL Kementerian Perhubungan, Indonesia

erliyanidian@gmail.com, de_riyadi@yahoo.com

*Penulis korespondensi: erliyanidian@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 22 Februari 2026;

Revisi: 20 Maret 2026;

Diterima: 21 April 2026;

Terbit: 30 April 2026

Keywords: Anti-Corruption

Competence; APPI Universities;

Maritime Industry; Moral

Commitment; Work Environment

Abstract. *This activity aims to improve the knowledge, awareness, and anti-corruption competency of final-year maritime cadets from all APPI member universities regarding international and national maritime anti-corruption regulations, further strengthening the ethical decision-making abilities of maritime cadets in dealing with corrupt situations in ports and on ships through a simulation approach based on real cases. This activity is designed as a participatory educational workshop with an active and experiential learning approach to adult learning (andragogy), which allows the implementation team to simultaneously collect scientific data on the effectiveness of workshop interventions in increasing participants' anti-corruption knowledge and awareness. The activity is carried out through three main stages that are systematically structured, namely the preparation stage, the implementation stage, and the evaluation and follow-up stage. The results of the activity confirm the effectiveness of the participatory workshop approach based on real case simulations (experiential learning) in significantly increasing knowledge and changing anti-corruption attitudes of maritime cadets in a relatively short duration. Furthermore, cadets have a stronger stock of knowledge, awareness, and moral commitment to deal with corrupt situations in the work environment. It is concluded that the participatory workshop approach based on real-life case simulations is an effective, efficient, and replicable strategy in empowering the next generation of Indonesian seafarers to face the challenges of corruption in the global maritime industry.*

Abstrak.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kompetensi anti-korupsi taruna pelayaran tingkat akhir dari seluruh perguruan tinggi anggota APPI terhadap regulasi anti-korupsi maritim internasional dan nasional; selanjutnya memperkuat kemampuan pengambilan keputusan etis taruna pelayaran dalam menghadapi situasi koruptif di pelabuhan dan di atas kapal melalui pendekatan simulasi berbasis kasus nyata. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk *Workshop* edukatif partisipatif (*participatory educational rWorkshop*) dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang bersifat aktif dan berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang memungkinkan tim pelaksana untuk sekaligus mengumpulkan data ilmiah tentang efektivitas intervensi *Workshop* terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran anti-korupsi peserta. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang terstruktur secara sistematis, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Hasil kegiatan mengkonfirmasi efektivitas pendekatan *Workshop* partisipatif berbasis simulasi kasus nyata (*experiential learning*) dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap anti-korupsi taruna pelayaran secara signifikan dalam durasi yang relatif singkat. Selanjutnya taruna telah memiliki bekal pengetahuan, kesadaran, dan komitmen moral yang lebih kuat untuk menghadapi situasi koruptif di lingkungan kerja. Disimpulkan bahwa pendekatan *Workshop* partisipatif berbasis simulasi kasus nyata merupakan strategi yang efektif, efisien, dan dapat direplikasi dalam memberdayakan *next generation seafarer* Indonesia untuk menghadapi tantangan korupsi di industri maritim global.

Kata kunci: APPI; Industri Maritim; Komitmen Moral; Kompetensi Anti-Korupsi; Lingkungan Kerja.

1. LATAR BELAKANG

Sektor maritim merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 kilometer menempatkan sektor pelayaran sebagai infrastruktur strategis nasional yang tidak dapat dipisahkan dari arus perdagangan global (Kundori, 2023); Wati, & Mokodompit, 2025). Di tengah urgensi tersebut, industri maritim internasional menghadapi ancaman serius berupa praktik korupsi yang telah mengakar dalam ekosistem pelayaran, mulai dari proses sertifikasi pelaut, pengurusan dokumen kapal, pemeriksaan kelaikan laut, hingga transaksi di pelabuhan.

Korupsi di sektor maritim bukan sekadar persoalan etika, melainkan ancaman sistemik yang berimplikasi langsung pada keselamatan jiwa di laut. Sejumlah kecelakaan laut yang terjadi di berbagai belahan dunia berkorelasi dengan lemahnya penegakan standar keselamatan akibat praktik suap dan gratifikasi dalam proses inspeksi dan sertifikasi (Kundori et al., 2025; Cruzate et al., 2025). Penelitian lainnya juga mengidentifikasi bahwa permintaan suap informal di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara (Hashim et al., 2021).

Kondisi ini menempatkan para pelaut, khususnya generasi muda calon perwira kapal (taruna pelayaran), pada posisi yang sangat rentan. Tanpa bekal pengetahuan, kesadaran, dan kompetensi anti-korupsi yang memadai, taruna pelayaran berisiko menjadi agen yang secara tidak sadar melanggengkan praktik koruptif yang telah dinormalisasi dalam budaya kerja di beberapa pelabuhan dan perusahaan pelayaran. Lebih jauh, ketiadaan pemahaman tentang regulasi anti-korupsi internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), *UK Bribery Act*, serta kode etik MACN menjadi celah serius dalam pembentukan karakter pelaut yang berintegritas (Naznin, 2025).

Perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksisaintek) yang terhimpun dalam Asosiasi Program Studi Bidang Pelayaran Indonesia (APPI) memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menjawab tantangan ini. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang sebagai salah satu institusi pendidikan maritim terkemuka di Indonesia menjadi garda terdepan dalam upaya internalisasi nilai-nilai integritas dan anti-korupsi kepada para taruna pelayaran. Namun demikian, kurikulum pendidikan maritim yang ada saat ini dinilai masih belum secara eksplisit dan terstruktur mengintegrasikan materi anti-korupsi sebagai kompetensi wajib yang harus dikuasai sebelum taruna terjun ke dunia kerja pelayaran internasional.

Kesenjangan antara kebutuhan industri maritim global yang mensyaratkan pelaut berintegritas tinggi dengan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan karakter anti-korupsi di

perguruan tinggi pelayaran Indonesia menjadi latar belakang utama diselenggarakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Melalui penyelenggaraan *Workshop* Anti Korupsi Maritim yang melibatkan seluruh perguruan tinggi anggota APPI, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi katalisator percepatan pembentukan budaya integritas di kalangan *next generation seafarer* Indonesia

Sejumlah kajian terdahulu telah memberikan landasan penting bagi kegiatan PkM ini. Penelitian menegaskan bahwa biaya korupsi dalam rantai logistik maritim global setara dengan 10-15% dari total biaya operasional pengiriman barang, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dan melemahkan daya saing industri pelayaran nasional (Sarker et al., 2021). Temuan lainnya tentang pelatihan keselamatan kerja di atas kapal bagi masyarakat dengan hasil peningkatan pengetahuan keselamatan sebesar 68% (Fauziningrum et al., 2025). Meski relevan dari aspek keselamatan, kajian ini sama sekali tidak menyentuh dimensi integritas dan anti-korupsi. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan hukum maritim internasional bagi siswa sekolah menengah kejuruan pelayaran, yang memberikan pemahaman dasar tentang konvensi-konvensi IMO, namun belum mengeksplorasi mekanisme praktis perlindungan diri pelaut dari jebakan korupsi di lapangan (Vega et al., 2024). Sehingga masih terdapat celah signifikan dalam literatur terdahulu. Belum ada kegiatan PkM yang secara khusus dirancang untuk memberdayakan taruna pelayaran Indonesia melalui *Workshop* anti-korupsi maritim yang terintegrasi, kontekstual, berbasis studi kasus lokal, dan melibatkan konsorsium seluruh perguruan tinggi maritim secara nasional.

Kegiatan ini merupakan yang pertama dalam sejarah pendidikan maritim Indonesia yang melibatkan seluruh perguruan tinggi anggota APPI secara serentak dalam satu kegiatan pemberdayaan anti-korupsi yang terstruktur dan terkoordinasi. Keterlibatan institusi di bawah dua kementerian sekaligus, yakni Kementerian Perhubungan dan Kemendiknas, memperkuat dimensi kebijakan dan potensi replikasi nasional dari model PkM ini. Selanjutnya sasaran kegiatan ini menargetkan *next generation seafarer*, yakni taruna pelayaran tingkat akhir yang berada dalam fase krusial transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja pelayaran internasional. Pendekatan preventif pada fase ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan intervensi korektif setelah pelaut terlanjur terjun ke lapangan dan terpapar budaya koruptif secara masif. Sebagai tawaran solusi komprehensif, kegiatan ini merancang sebuah ekosistem pelatihan anti-korupsi maritim yang terdiri dari modul *Workshop* satu hari intensif yang dapat direplikasi oleh seluruh anggota APPI secara mandiri pasca-kegiatan, buku panduan Anti-Korupsi Maritim untuk Taruna Pelayaran yang memuat studi kasus lokal, simulasi, dan panduan praktis menghadapi tekanan koruptif di lapangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kompetensi anti-korupsi taruna pelayaran tingkat akhir dari seluruh perguruan tinggi anggota APPI terhadap regulasi anti-korupsi maritim internasional dan nasional; memperkuat kemampuan pengambilan keputusan etis taruna pelayaran dalam menghadapi situasi koruptif di pelabuhan dan di atas kapal melalui pendekatan simulasi berbasis kasus nyata; menghasilkan model *Workshop* anti-korupsi maritim yang kontekstual, terstruktur, dan dapat direplikasi oleh seluruh institusi pendidikan pelayaran anggota APPI secara mandiri; memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan pendidikan maritim terkait integrasi materi anti-korupsi ke dalam kurikulum program studi pelayaran di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan Kemendiknas.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian ini dirancang dalam bentuk *Workshop* edukatif partisipatif (*participatory educational Workshop*) dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang bersifat aktif dan berbasis pengalaman (*experiential learning*) (Wahyuni & Riyanto, 2022). Pemilihan rancangan *Workshop* partisipatif didasarkan pada pertimbangan bahwa taruna pelayaran tingkat akhir merupakan peserta didik dewasa yang telah memiliki pengalaman praktik berlayar melalui program Praktek Laut (Prala), sehingga lebih efektif untuk dibelajarkan melalui diskusi kasus, simulasi situasi nyata, dan refleksi pengalaman dibandingkan metode ceramah satu arah yang bersifat pasif. Rancangan kegiatan ini mengacu pada model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) yang diadaptasi ke dalam konteks anti-korupsi maritim, di mana setiap sesi *Workshop* dirancang untuk menghadirkan dilema etis dan situasi koruptif yang realistis sebagaimana yang lazim dijumpai di lingkungan pelabuhan dan kapal niaga internasional.

Kegiatan ini menggunakan desain penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*) yang memungkinkan tim pelaksana untuk sekaligus mengumpulkan data ilmiah tentang efektivitas intervensi *Workshop* terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran anti-korupsi peserta. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdimensi pengabdian sosial, tetapi juga menghasilkan temuan empiris yang dapat disumbangkan kepada khazanah ilmu pendidikan karakter di perguruan tinggi vokasi bidang pelayaran

Sasaran utama kegiatan ini adalah taruna pelayaran tingkat akhir dari seluruh perguruan tinggi anggota Asosiasi Program Studi Bidang Pelayaran Indonesia (APPI) yang terdiri dari institusi pendidikan maritim di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas). Pemilihan taruna tingkat akhir

sebagai sasaran primer didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa kelompok ini berada dalam fase transisi krusial menuju dunia kerja pelayaran internasional, sehingga internalisasi nilai-nilai integritas dan anti-korupsi pada fase ini dinilai memiliki dampak preventif jangka panjang yang paling optimal.

Kegiatan *Workshop* dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 bertempat di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jalan Singosari No. 2A, Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan PIP Semarang sebagai lokasi pelaksanaan didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa institusi ini merupakan salah satu perguruan tinggi maritim tertua, terbesar, dan paling representatif di Indonesia yang memiliki fasilitas ruang pelatihan berkapasitas besar, laboratorium simulasi maritim, serta aksesibilitas transportasi yang memadai bagi peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan selama satu hari penuh mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIB, yang dibagi ke dalam empat sesi utama: sesi pembukaan dan orientasi (07.30–09.00 WIB), sesi pemaparan materi dan diskusi regulasi anti-korupsi maritim internasional dan nasional (09.00–11.30 WIB), sesi simulasi kasus dan role-play dilema etis (13.00–15.30 WIB), serta sesi refleksi, penyusunan komitmen integritas, dan penutupan (15.30–17.00 WIB).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang terstruktur secara sistematis, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Tahap persiapan meliputi serangkaian aktivitas koordinatif dan substantif. Pada fase ini, tim PkM melakukan koordinasi intensif dengan pengurus APPI dan seluruh koordinator program studi anggota untuk menyepakati mekanisme seleksi dan pengiriman peserta dari masing-masing institusi. Secara paralel, tim juga melakukan kajian kebutuhan (*need assessment*) melalui survei daring kepada 120 taruna tingkat akhir dari delapan perguruan tinggi pelayaran anggota APPI guna mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal dan persepsi mereka tentang korupsi maritim. Hasil *need assessment* ini kemudian digunakan sebagai basis penyusunan konten modul *Workshop* dan skenario studi kasus yang kontekstual. Pada tahap ini pula dilakukan uji coba (*piloting*) modul kepada 20 taruna PIP Semarang untuk memastikan keterbacaan dan relevansi materi sebelum digunakan dalam *Workshop* nasional.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan PkM ini. Pelaksanaan *Workshop* dibagi ke dalam empat sesi yang saling berkesinambungan. Sesi pertama diawali dengan registrasi peserta, pengisian pre-test melalui Google Form, dan pembukaan resmi oleh Direktur PIP Semarang serta Ketua APPI. Sesi kedua menghadirkan dua narasumber utama, yakni dosen dan praktisi industri pelayaran internasional, yang memaparkan regulasi anti-korupsi maritim internasional dan nasional serta dampak nyata korupsi terhadap keselamatan pelayaran dan

iklim bisnis maritim Indonesia. Sesi ketiga merupakan inti pedagogis *Workshop*, di mana peserta dibagi ke dalam 15 kelompok kecil beranggotakan 8–10 orang untuk melaksanakan simulasi studi kasus dan role-play menghadapi situasi koruptif. Setiap kelompok didampingi oleh satu fasilitator terlatih yang bertugas memandu diskusi dan memastikan kedalaman refleksi etis. Sesi keempat ditutup dengan presentasi komitmen integritas oleh perwakilan kelompok, penandatanganan Deklarasi Pelaut Berintegritas, dan pengisian post-test serta kuesioner kepuasan peserta.

Tahap evaluasi dan tindak lanjut mencakup analisis data pre-test dan post-test, penyusunan laporan pelaksanaan, penulisan artikel ilmiah, serta penyerahan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Perhubungan dan Kemendiktisaintek. Pada tahap ini pula dilakukan diseminasi modul *Workshop* kepada seluruh anggota APPI agar dapat direplikasi secara mandiri di institusi masing-masing sebagai tindak lanjut berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan empat teknik yang saling melengkapi. Pertama, survei tertulis melalui kuesioner pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh peserta *Workshop*. Pre-test diberikan sebelum kegiatan dimulai untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan persepsi peserta terhadap korupsi maritim, sedangkan post-test diberikan segera setelah seluruh sesi *Workshop* selesai untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap yang terjadi akibat intervensi *Workshop*.

Data yang terkumpul dari kegiatan ini dianalisis menggunakan pendekatan mixed methods yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif secara komplementer. Analisis data kuantitatif dilakukan terhadap hasil pre-test dan post-test KPAM serta SSIP. Untuk mengukur signifikansi peningkatan skor antara pre-test dan post-test, digunakan uji Wilcoxon Signed-Rank Test mengingat distribusi data yang tidak sepenuhnya normal pada sampel berukuran sedang. Besar efek (*effect size*) intervensi *Workshop* dihitung menggunakan rumus Cohen's d, dengan interpretasi nilai $d < 0,2$ sebagai efek kecil, $d = 0,2-0,8$ sebagai efek sedang, dan $d > 0,8$ sebagai efek besar. Selain itu, dihitung pula N-Gain Score untuk setiap peserta guna mengukur proporsi peningkatan yang dicapai relatif terhadap potensi peningkatan maksimum yang mungkin terjadi, dengan kriteria N-Gain tinggi apabila $g > 0,70$, sedang apabila $0,30 \leq g \leq 0,70$, dan rendah apabila $g < 0,30$. Sedangkan Analisis data kualitatif dilakukan terhadap transkrip FGD, lembar observasi, dan dokumen hasil kerja kelompok peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Workshop Anti Korupsi Maritim yang diselenggarakan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Kegiatan diikuti oleh 127 orang peserta taruna pelayaran tingkat akhir yang merepresentasikan beberapa institusi perguruan tinggi anggota Asosiasi Program Studi Bidang Pelayaran Indonesia (APPI), yang terdiri dari 3 institusi di bawah Kementerian Perhubungan dan beberapa perguruan tinggi pelayaran di bawah Kemendiktisaintek. Tingkat kehadiran institusi mencapai 100%, melampaui target awal sebesar 80%, yang menunjukkan tingginya komitmen dan antusiasme seluruh anggota APPI terhadap agenda pemberdayaan integritas taruna pelayaran secara nasional. Selain peserta taruna, hadir pula 6 orang narasumber dan fasilitator, serta beberapa orang pendamping dari institusi masing-masing.



Gambar 1. foto bersama anggota APPI dan peserta

Empat sesi utama *Workshop* berlangsung seluruhnya sesuai jadwal tanpa hambatan teknis yang berarti. Tingkat partisipasi aktif peserta selama sesi simulasi dan role-play dinilai sangat tinggi oleh para observer, dengan hampir seluruh kelompok menyelesaikan seluruh skenario simulasi yang disediakan. Sebanyak 127 peserta mengisi pre-test sebelum kegiatan dimulai dan 124 peserta (97,6%) mengisi post-test setelah seluruh sesi selesai, sehingga data dari 124 peserta yang mengisi keduanya digunakan dalam analisis kuantitatif. Tiga peserta tidak mengisi post-test karena harus meninggalkan lokasi lebih awal akibat alasan teknis perjalanan. Seluruh 127 peserta menandatangani Deklarasi Pelaut Berintegritas pada sesi penutupan sebagai bentuk komitmen moral terhadap nilai-nilai integritas yang telah diinternalisasi selama *Workshop*.



Gambar 2. pemberian Materi dari narasumber

Hasil Peningkatan Pengetahuan Anti-Korupsi Maritim (KPAM)

Tabel 1. menunjukkan peningkatan yang konsisten pada seluruh dimensi pengukuran KPAM

Dimensi Pengukuran	Rerata Pre-Test	Rerata Post-Test	Selisih	N-Gain Score	Kategori
Pengetahuan Regulasi Anti-Korupsi Internasional & Nasional	52,4	81,7	+29,3	0,62	Sedang
Kemampuan Identifikasi Situasi Koruptif di Lingkungan Pelayaran	44,8	79,3	+34,5	0,62	Sedang
Pemahaman Mekanisme Pelaporan & Perlindungan Whistleblower	38,2	74,6	+36,4	0,59	Sedang
RERATA KESELURUHAN (KPAM)	45,1	78,5	+33,4	0,61	Sedang

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan yang konsisten pada seluruh dimensi pengukuran KPAM. Rerata skor keseluruhan meningkat signifikan dari 45,1 pada pre-test menjadi 78,5 pada post-test, dengan selisih peningkatan sebesar 33,4 poin. Dimensi pemahaman mekanisme whistleblower mengalami peningkatan paling besar dalam nilai absolut (36,4 poin), sekaligus mencerminkan kondisi awal terendah (38,2) yang mengindikasikan bahwa aspek perlindungan pelapor merupakan materi yang paling asing bagi peserta sebelum mengikuti *Workshop*. Sementara itu, dimensi pengetahuan regulasi mencatat nilai pre-test tertinggi (52,4) di antara tiga dimensi, yang dapat dipahami mengingat sebagian kecil peserta telah memiliki paparan awal terhadap regulasi keselamatan maritim melalui mata kuliah hukum maritim di kampus masing-masing.

N-Gain Score keseluruhan sebesar 0,61 masuk dalam kategori sedang ($0,30 \leq g \leq 0,70$). Meski tidak mencapai kategori tinggi, hasil ini dinilai sangat bermakna mengingat durasi intervensi yang hanya berlangsung satu hari. Capaian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa intervensi pendidikan satu hari yang dirancang secara intensif dan kontekstual dapat menghasilkan efek pembelajaran yang setara dengan pembelajaran konvensional selama beberapa minggu, khususnya pada materi yang memiliki relevansi langsung dengan pengalaman hidup peserta (Cianciolo & Regehr, 2019).

Hasil Perubahan Sikap Integritas (SSIP)

Perubahan sikap integritas peserta diukur menggunakan Skala Sikap Integritas Pelaut (SSIP) yang mencakup dua dimensi: orientasi nilai integritas dan efikasi diri dalam menolak tekanan koruptif. Hasil analisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Skor Pre-Test dan Post-Test SSIP per Dimensi (N=124)

Dimensi Sikap	Rerata Pre-Test	Rerata Post-Test	Selisih	Cohen's d	Kategori Efek
Orientasi Nilai Integritas dan Anti-Korupsi	3,21	4,18	+0,97	0,84	Besar
Efikasi Diri dalam Menolak Tekanan Koruptif	2,89	3,97	+1,08	0,91	Besar
RERATA KESELURUHAN (SSIP)	3,05	4,08	+1,03	0,88	Besar

Hasil pada Tabel 2 mengungkap temuan yang sangat menonjol: perubahan sikap peserta menunjukkan *effect size* yang lebih besar dibandingkan perubahan pengetahuan. Cohen's d sebesar 0,88 pada dimensi efikasi diri dan 0,84 pada dimensi orientasi nilai integritas keduanya masuk dalam kategori efek besar ($d > 0,80$). Temuan ini memiliki makna pedagogis yang sangat penting yaitu *Workshop* yang dirancang dengan metode simulasi berbasis kasus nyata tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan regulatif, tetapi lebih jauh mampu menggeser keyakinan dasar peserta tentang kemampuan diri mereka untuk menolak tekanan koruptif (DiBello et al., 2009).

Secara khusus, peningkatan skor efikasi diri dari 2,89 menjadi 3,97 (skala 1–5) menandakan pergeseran signifikan dari kondisi awal di mana mayoritas peserta meragukan kemampuan mereka untuk menolak permintaan suap di bawah tekanan atasan atau rekan senior, menuju kondisi pasca-*Workshop* di mana mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki strategi konkret untuk menghadapi situasi tersebut. Hal ini selaras dengan teori efikasi diri yang menegaskan bahwa pengalaman belajar berbasis simulasi (*vicarious experience*) merupakan salah satu sumber efikasi diri yang paling efektif, terutama ketika simulasi tersebut dirancang semirip mungkin dengan situasi nyata yang akan dihadapi individu (Karabacak et al., 2019).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan PkM ini mengkonfirmasi efektivitas pendekatan *Workshop* partisipatif berbasis simulasi kasus nyata (*experiential learning*) dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap anti-korupsi taruna pelayaran secara signifikan dalam durasi yang relatif singkat. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian yang membuktikan superioritas pendekatan simulasi berbasis kasus nyata dibandingkan metode ceramah dalam pembentukan internalisasi nilai integritas pada peserta didik (Sisternans, 2020; Mulawarman et al., 2024). Lebih jauh, efek perubahan sikap (Cohen's $d = 0,88$) yang lebih

besar dibandingkan efek peningkatan pengetahuan (Cohen's $d = 0,79$) dalam studi ini menjadi temuan yang secara teoritis bermakna: intervensi berbasis pengalaman tidak sekadar mengisi kesenjangan kognitif, tetapi mampu menembus lapisan afektif yang justru lebih menentukan perilaku nyata individu dalam situasi koruptif di lapangan. Kegiatan ini mencatat peningkatan pengetahuan yang setara (rerata N-Gain 0,61 atau peningkatan $\sim 74\%$) meskipun dilaksanakan dalam durasi yang lebih singkat dan tanpa dukungan platform e-learning. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tatap muka yang intensif dengan metode yang tepat dapat menjadi alternatif yang efektif dan lebih terjangkau untuk pendidikan tinggi pelayaran di Indonesia yang belum seluruhnya memiliki infrastruktur digital yang memadai.

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini dapat diidentifikasi dari tiga aspek. Pertama, ketepatan pemilihan sasaran pada fase transisi kritis taruna tingkat akhir terbukti meningkatkan relevansi dan motivasi belajar peserta, sebagaimana tercermin dalam tingginya partisipasi aktif selama sesi simulasi (skor FPP 4,12). Kedua, keterlibatan narasumber dari dunia industri dan lembaga anti-korupsi memberikan otentisitas dan legitimasi yang memperkuat persepsi peserta bahwa materi yang disampaikan relevan dengan dunia kerja yang akan mereka masuki. Ketiga, dukungan kelembagaan APPI yang mengkoordinasikan kehadiran seluruh anggota menciptakan atmosfer solidaritas nasional yang memperkuat motivasi kolektif peserta untuk bersama-sama menjadi agen perubahan di sektor pelayaran Indonesia.

Dampak kegiatan ini bagi mitra dan masyarakat sasaran dapat dilihat dari tiga dimensi. Secara individu, 127 taruna pelayaran telah memiliki bekal pengetahuan, kesadaran, dan komitmen moral yang lebih kuat untuk menghadapi situasi koruptif di lingkungan kerja. Secara kelembagaan, seluruh anggota APPI kini memiliki modul *Workshop* dan buku panduan anti-korupsi maritim yang dapat direplikasi secara mandiri dalam kegiatan pembelajaran di kampus masing-masing. Secara sistemik, rekomendasi kebijakan yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Kemendikstisaintek membuka peluang nyata bagi integrasi materi anti-korupsi maritim ke dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi pelayaran, yang apabila terealisasi akan memberikan dampak jangka panjang bagi ratusan ribu taruna pelayaran di seluruh Indonesia pada beberapa dekade mendatang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan *Workshop* partisipatif berbasis simulasi kasus nyata merupakan strategi yang efektif, efisien, dan dapat direplikasi dalam memberdayakan *next generation seafarer* Indonesia untuk menghadapi tantangan korupsi di industri maritim global. Keberlanjutan dan perluasan program ini melalui kolaborasi lintas kementerian dan konsorsium APPI menjadi kunci bagi terwujudnya ekosistem pelayaran nasional yang bersih, aman, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Beberapa kendala dan keterbatasan yang dijumpai dalam pelaksanaan perlu dicatat untuk perbaikan di masa mendatang. Durasi *Workshop* satu hari, meskipun terbukti efektif untuk intervensi awal, dinilai masih kurang memadai untuk menuntaskan sesi aplikasi regulasi yang memerlukan latihan berulang (skor FPP terendah pada aspek aplikasi regulasi, yakni 3,61). Selain itu, tidak adanya mekanisme follow-up terstruktur pasca-*Workshop* menjadi keterbatasan yang berpotensi mengurangi durabilitas perubahan sikap yang telah terbentuk, mengingat bahwa teori pemrosesan informasi menegaskan perlunya penguatan berkala untuk mengkonsolidasikan perubahan perilaku jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan modul e-learning sebagai komplemen *Workshop* tatap muka menjadi agenda prioritas yang perlu ditindaklanjuti oleh APPI dan kedua kementerian yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Cianciolo, A. T., & Regehr, G. (2019). Learning theory and educational intervention: Producing meaningful evidence of impact through layered analysis. *Academic Medicine*, 94(6), 789–794. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002591>
- Cruzate, R. F., Corpuz, J. T., & Corpuz, J. M. C. M. (2025). Case study analysis in maritime incidents: A research tool for advancing safety, sustainability, and security. In *Research methods for advancing the maritime industry* (pp. 109–144). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1052-7.ch005>
- DiBello, L., Missildine, W., & Struttman, M. (2009). Intuitive expertise and empowerment: The long-term impact of simulation training on changing accountabilities in a biotech firm. *Mind, Culture, and Activity*, 16(1), 11–31. <https://doi.org/10.1080/10749030802363863>
- Fauziningrum, E., Hermawati, R., Mahendro, I., Kristiyanti, M., Kundori, K., & Wibowo, P. A. (2025). Meningkatkan kesadaran akan pentingnya alat keselamatan pelayaran bagi masyarakat Waduk Kedung Ombo. *Journal of Transportation Society Empowerment*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.46484/jtse.v3i1.1045>

- Hashim, N., Noor, M. M., Harun, M., & Abdullah, W. M. W. (2021). The maritime governance concept in the context of anti-corruption, logistics cyber security and national customs transit system's issues and challenges in Malaysia. *Journal of Maritime Logistics*, 1(1), 45–59.
- Karabacak, U., Unver, V., Ugur, E., Kocatepe, V., Ocaktan, N., Ates, E., & Uslu, Y. (2019). Examining the effect of simulation-based learning on self-efficacy and performance of first-year nursing students. *Nurse Education in Practice*, 36, 139–143. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.03.012>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315816951>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Kundori, K. (2023). Implementasi kebijakan transportasi laut dalam rangka pengembangan sistem logistik nasional. *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 21(1), 52–60.
- Kundori, K., Mawardi, K., Khamdilah, A., Rosita, N. D., Hermawati, R., & Kristiyanti, M. (2025). Analysis of the influence of human and technical factors in mooring rope accidents in ship operations at the ports of Indonesia. *International Journal of Basic and Applied Sciences*, 14(2), 241–246. <https://doi.org/10.14419/04c6fb72>
- Mulawarman, W. G., Kundori, K., Tubagus, M., Judijanto, L., & Susilawati, M. (2024). Character education management in improving students' spiritual intelligence. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 79–90. <https://doi.org/10.31538/ndh.v9i1.4550>
- Naznin, S. (2025). Global trends in anti-corruption legislation and compliance: A comparative analysis of integrity frameworks and emerging challenges. *Research Consortium Archive*, 3(3), 1119–1148.
- Sarker, S., Henningsson, S., Jensen, T., & Hedman, J. (2021). The use of blockchain as a resource for combating corruption in global shipping: An interpretive case study. *Journal of Management Information Systems*, 38(2), 338–373. <https://doi.org/10.1080/07421222.2021.1912919>
- Sisternans, I. J. (2020). Integrating competency-based education with a case-based or *problem-based learning* approach in online health sciences. *Asia Pacific Education Review*, 21(4), 683–696. <https://doi.org/10.1007/s12564-020-09658-6>

- Transparency International. (2023). *Global corruption report: Corruption and the maritime sector*. Transparency International.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Anti-corruption in the maritime sector*. United Nations. <https://www.unodc.org>
- Vega, D. N., Putri, D. N. S., Ananda, A., & Manik, L. A. (2024). Implementasi dan tantangan hukum laut internasional di Indonesia: Analisis komprehensif tentang perkembangan, peran organisasi internasional, dan eksploitasi sumber daya laut. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 19021–19033. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.15047>
- Wahyuni, L., & Riyanto, S. (2022). Model sekolah adiwiyata melalui program asistensi mengajar berbasis pembelajaran experiential. *Jurnal Paedagogy*, 9(4), 616–628. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i4.5673>
- Wati, M. S., & Mokodompit, E. A. (2025). Penguatan infrastruktur maritim sebagai pilar strategis menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Panorama: Jurnal Kajian Pariwisata*, 4(1), 71–80. <https://doi.org/10.34833/panorama.v1i1.1395>